

ABSTRAK

Peningkatan perekonomian, dibangun melalui iklim investasi yang sehat, dan kuat, termasuk bagi Usaha Mikro, dan Kecil. Sayangnya, peraturan terkait investasi Usaha Mikro, dan Kecil belum sepenuhnya mencerminkan hubungan berkeadilan antara pelaku usaha Menengah dan Besar dengan Usaha Mikro, dan Kecil. Tesis ini mengangkat permasalahan terkait 1) hambatan investasi Usaha Mikro, dan Kecil dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, serta 2) faktor- faktor yang diperlukan pemerintahan yang progresif untuk mengembangkan investasi Usaha Mikro, dan Kecil berdasarkan perspektif politik hukum pada implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan yuridis normatif terhadap peraturan perundang-undangan. Berdasarkan analisa tersebut, untuk meningkatkan daya saing Usaha Mikro, dan Kecil, dalam implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berdasarkan perspektif politik hukum, perlu adanya strategi pemerintahan yang progresif, dengan menumbuhkan moralitas Pelaku Usaha yang lebih besar, sebagaimana amanat Sila Kelima Pancasila.

Kata kunci: Investasi, Politik Hukum, Pemerintahan progresif

ABSTRACT

Economic Enhancement to be built through a healthy and strong investment climate, including for Micro and Small Business. Unfortunately, regulations related to investment for Micro and Small Business do not fully reflect the existence of a fair relationship between medium and large business actors with Micro and small business. This thesis raises 1) issues related to investment for Micro and Small Business barriers in Law Number 20 of 2008, as well as 2) the factors required by a progressive government to develop Investment for Micro and Small Business based on a political law perspective on the implementation Law Number 11 of 2020 of the Job Creation Act. This research uses a literature study method with a normative juridical to statute approach. Based on this analysis, in order to increase the competitiveness of Micro and small business, in implementing Law Number 11 of 2020 on Job Creation on a legal political perspective, it is necessary to have a progressive government strategy, namely by fostering greater morality in business actors, as mandated in the Fifth Precepts of Pancasila.

Keywords: investment, Political Law, Progressive government